

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Dumai

4.1.1 Sejarah Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah kota di provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari kota Pekanbaru. Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km², sebelumnya Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokrowi. Namun semenjak Monokrowi pecah dan terbentuk kabupaten Wasior, maka Dumai pun menjadi yang terluas. Tercatat dalam sejarah, Dumai adalah sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pantai timur Sumatera.

Nama Dumai menurut cerita rakyat tentang Putri Tujuh, berasal dari kata di Lubuk dan Umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi dumai.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, dengan UU No. 16 tahun 1999 tanggal 20 April 1999, setelah sebelumnya sempat menjadi kota administratif (kotif) di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².

Saat ini Kota Dumai sebagai kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas Internasional. Dulu, Dumai hanyalah sebuah dusun nelayan yang sepi, berada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di pesisir Timur Provinsi Riau, Indonesia. Kini, Dumai yang kaya dengan minyak bumi itu, berubah menjadi kota pelabuhan minyak yang sangat ramai sejak tahun 1999. Kapal-kapal tangki minyak raksasa setiap harinya singgah dan merapat di pelabuhan ini. Kilang-kilang minyak yang tumbuh menjamur di sekitar pelabuhan menjadi Kota Dumai pada malam hari gemerlapan bak permata berkilauan.

Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa jaman penjajahan jepang) dari Jawa. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut:

1. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa.
2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah kecamatan Rupert.
3. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kewedanan.
4. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.
5. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kota Madya sehingga menjadi Kota Madya Dati II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar UU No. 22 tahun 1999 maka Kota Madya Dumai berubah menjadi Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Terdapat beberapa filosofis yang cukup mendasar atas peningkatan status Kota Dumai dalam tatanan pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan, diantaranya adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran dari masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan proses pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat, disamping itu juga untuk menangkap berbagai peluang dan pengembangan ekonomi. Didalam sejarah kota Dumai pernah menjadi kota paling luas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari, di Papua. Akan tetapi, semenjak Kota Manokwari tersebut pecah dan kemudian terbentuk Kabupaten Wasior, maka Kota Dumai pun menjadi kota terluas di Indonesia. Dalam catatan sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil didaerah pesisir timur Provinsi Riau. Dan kini kota ini terus menggeliat, menjadi mutiara di pantai timur Pulau Sumatera. Kota Dumai juga dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri, pengantin berseri adalah singkatan dari (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism, dan Industri) berseri (Bersih, Semarak, Rukun, dan Indah).

4.1.2 Kondisi Geografis

Secara geografis, Kota Dumai terletak di 1023-1024'23" Bujur Timur dan 101023'37"-101028'13" Lintang Utara dengan batas wilayah sebelah Utara, Dumai berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Sebelah Timur, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Sebelah selatan, Dumai berbatasan dengan kecamatan Mandau dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Dan sebelah Barat, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah Kota Dumai beriklim tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-33°C dengan kondisi tanah rawa bergambut.

4.1.3 Pembagian Wilayah

Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tanggal 20 April 1999, yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Bukit Kapur. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, serta Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Medang Kampai, sehingga Kota Dumai memiliki lima kecamatan. Pada tahun 2009 ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2009 tentang pembentukan dua kecamatan baru yaitu Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan, sehingga secara administrasi Kota Dumai terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, 33 Kelurahan serta 527 Rukun Tetangga. Berikut wilayah administrasi dari Kota Dumai :

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Dumai

No	WILAYAH ADMINISTRASI	
	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Bukit Kapur	Bagan Besar, Bukit Kayu Kapur, Bukit Nenas, Gurun Panjang, Kampung Baru
2	Dumai Barat	Bagan Keladi, pangkalan Sesai, Purnama, Simpang Tetap darul Ichsan
3	Dumai Kota	Bintan Dumai, Kota Laksamana, Rimba Sekampung, Sukajadi
4	Dumai Selatan	Bukit Datuk, Bukit Timah, Bumi Ayu, mekar Sari, Ratu Sima
5	Dumai Timur	Bukit Batrem, Buluh Kasap, Jaya Mukti, Tanjung Palas, Teluk Binjai
6	Dumai Kampai	Guntung, Mundam, Pelintung, Teluk Makmur
7	Sungai Sembilan	Bangsar Aceh, Basilam Baru, Batu Teritip, Lubuk Gaung

Sumber: BPS Dumai

4.2 Gambaran Umum Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dimaksud dengan pariwisata adalah sebagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri untuk berbagai kepentingan bagi kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini sesuai dengan SOP dan sasaran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan daya tarik pariwisata, serta mengembangkan diskusi objek wisata, seperti situs sejarah Danau Bunga Tujuh, Pantai Teluk Makkmur;
2. Mengembangkan potensi perdagangan serta kegiatan perekonomian daerah yang berpihak pada ekonomi kerakyatan;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepariwisataan;
4. Meningkatkan mutu promosi pariwisata;
5. Meningkatkan kelestarian dan pengembangan budaya melayu;
6. Meningkatkan promosi pariwisata, kesenian, dan budaya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Adapun tugasnya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembantu;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Meningkatkan pengembangan apresiasi seni budaya;
- e. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata;
- f. Penyeleggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1 Tugas, Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Dumai No.16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah, dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Dumai sebagai berikut :

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan;
2. Mengkoordinasi membina dan;
3. Mengendalikan serta melaksanakan urusan kegiatan dan program dibidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dibidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
2. Perumusan kebijakan dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas pelayanan Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
4. Pengkoordinasian kewenangan bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang dikerjasamakan dengan daerah kabupaten atau kota lain dan provinsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.2.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub bagian Administrasi dan Umum;
 2. Sub bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
 3. Sub bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
 1. Seksi Organisasi Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Olahraga;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
- d. Bidang Pariwisata terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan dan Objek Wisata;
 2. Seksi Sarana Pariwisata;
 3. Seksi Promosi Pengembangan Pariwisata.
- e. Unit Pelaksanaan Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.3 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dalam menyongsong era globalisasi dan akan segera diberlakukan pasar bebas, tentunya akan menjadi kompetisi yang sangat ketat dalam dunia usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau investasi, dimana akan banyak membutuhkan informasi peluang usaha, perizinan-perizinan ataupun dokumen-dokumen lain.

Mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Dumai dengan keputusan Walikota Nomor 17 Tahun 2002 telah membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Yantersatu) dan telah ditetapkan pula dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 26 Tahun 2005 dalam bentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KTP). Diresmikan pada tanggal 21 April 2006 oleh Walikota Dumai.

Tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur pemerintah Kota Dumai khususnya yang terlibat langsung dengan pelayanan masyarakat;
3. Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya masyarakat dapat terdorong untuk ikut.

4.3.1 Tugas, Pokok, dan Fungsi

Tugas pokoknya adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal secara terpadu.

Fungsi DPMPTSP adalah perumusan kebijakan teknis perizinan, Pengkoordinasian penyusunan teknis perizinan, Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perizinan, Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3.2 Wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2011 tentang pendelegasian sebagai wewenang pelayanan dan penandatanganan perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai, bahwa dalam rangka untuk memberikan perizinan dan guna mewujudkan *One Stop Service* (OSS), maka perlu adanya pelimpahan sebagai kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.

Adapun sebagai kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP tersebut meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan;
2. Izin Penggunaan Bangunan;
3. Surat Izin Tempat Usaha;
4. Izin Gangguan;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan;
6. Tanda Daftar Perusahaan;
7. Tanda Daftar Gudang;
8. Izin Usaha Industri;
9. Perizinan Penanaman Modal;
10. Izin Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
11. Izin Penyelenggaraan Optik;
12. Izin Apotik;
13. Izin Toko Obat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Izin Balai Pengobatan;
15. Izin Laboratorium;
16. Izin Rumah Bersalin;
17. Izin Praktek Terapi Bicara;
18. Izin Praktek Fisioterapi;
19. Izin Praktek Bidan;
20. Izin Dokter Spesialis;
21. Izin Dokter Umum;
22. Izin Dokter Gigi;
23. Izin Perawat Gigi;
24. Izin Depot Air Isi Ulang;
25. Izin Usaha Perkebunan;
26. Izin Usaha Peternakan;
27. Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum;
28. Izin Kendaraan Bermotor;
29. Izin Usaha Kolam Renang;
30. Izin Usaha Golf;
31. Izin Hotel;
32. Izin Restoran;
33. Izin Karaoke;
34. Izin Salon;
35. Izin Pusat Permainan;
36. Izin Biliard;
37. Izin Panti Pijat;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

38. Izin Transportasi;
39. Izin Pusat Olahraga;
40. Izin Katering;
41. Izin Perawatan Kecantikan;
42. Izin Usaha Perdagangan;
43. Izin Reklame/Spanduk;
44. Izin Penggunaan Racun Api;
45. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
46. Izin Pasir Laut;
47. Izin Usaha Pasir Cuci;
48. Izin Tanah Timbun;
49. Izin Pengeboran;
50. Izin Pengembalian Air Tanah;
51. Izin Turap;
52. Pendaftaran Penanaman Modal;
53. Izin Prinsip Penanaman Modal;
54. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
55. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan Izin Usaha Perubahan Izin Lokasi;
56. Izin Usaha Ketenagalistrikan Umum;
57. Izin Usaha Ketenagalistrikan Sendiri;
58. Izin Pengembalian Air Pemukiman;
59. Izin Tanah Timbun;
60. Izin Usaha Jasa Konstruktif;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

61. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
62. Izin Usaha Jasa Konstruktif;
63. Izin Bantuan Bukan Mineral;
64. Izin Pengembalian Air Permukaan;
65. Izin Lay Operasi;
66. Perusahaan Penanaman Modal;
67. Izin Usaha Perubahan Izin Lokasi;
68. Izin Penggunaan Bejana Tekan;
69. Izin Penggunaan Instalasi Listrik;
70. Izin Penggunaan Penyalur Petir;
71. Izin Penggunaan Tower Crene;
72. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet;
73. Izin Pengobatan Tradisional.

4.3.3 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Kepala badan pelayanan terpadu dan penanaman modal kota dumai;
2. Sekretaris
 - a. Sub bagian tata usaha;
 - b. Sub bagian keuangan dan perlengkapan;
 - c. Sub bagian program evaluasi dan pelaporan.
3. Bidang-bidang
 - a. Bidang kerjasama dan promosi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sub bidang kerjasama dan penanaman modal;
2. Sub bidang promosi dan penanaman modal.
- b. Bidang pelayanan dan pengendalian penanaman
 1. Sub bidang pelayanan verifikasi dan penanaman modal;
 2. Sub bidang pengawasan dan pengendalian pelayanan penanaman modal.
- c. Bidang pengembangan potensi
 1. Sub bidang survey pengelolaan data sistem informasi;
 2. Sub bidang pengembangan dan daya tarik penanaman modal;
- d. Bidang pelayanan perizinan terpadu
 1. Sub bidang perizinan dan non perizinan;
 2. Sub bidang pengaduan

4.4 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pada pasal 128 menyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai tindak lanjut peraturan perundangan-undangan tersebut Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor 38 tanggal 28 April 2001. Sejalan dengan meningkatnya akan tugas dan tanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

jawab Satuan Polisi Pamong Praja maka dahulunya Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tersebut maka tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro tata Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

4.4.1 Tugas, Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disebutkan bahwa fungsi dan tugas pokok satpol PP adalah:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat didaerah;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan aparatur lainnya;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah.

4.4.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penertiban dan Penegakkan Produk Hukum;
- d. Seksi Pengendalian Masyarakat;
- e. Seksi Pembinaan Personil dan Satuan Tugas;
- f. UPT Pemadam Kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman kebijaksanaan pelaksanaan ketentraman dn ketertiban serta penegakkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Keputusan Walikota;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan kapasitas personil Satuan Polisi Pamong Praja, Penyuluhan, dokumentasi dan pelaporan;
3. Penyiapan bahan pembinaan , dan pengendalian pengamanan, operasi penertiban, pengawalan serta kesempatan strategis, penegakkan hukum;
4. Penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
5. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kebakaran;
6. Penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya.

4.5 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota

Dumai

Gambar 4.5 Struktur Organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan tujuan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

